

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan merupakan suatu organisasi bisnis yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan, laba perusahaan, maupun memberikan insentif kepada *stakeholder* baik dalam bentuk dividen, hubungan yang andil dengan pemasok, (Merna, 2021). Dalam hal ini perusahaan bertanggung jawab pada pihak yang berkepentingan dalam perusahaan maupun pemegang saham dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Peran perusahaan dalam fokus kepentingan pada pemegang saham dapat menyebabkan perusahaan mengabaikan masalah dan dampak lingkungan dan sosial yang timbul dari kegiatan perusahaan, (Liana, 2019).

Banyaknya kasus pencemaran lingkungan seperti penggundulan hutan, perubahan iklim, dan peningkatan polusi saat ini menjadi topik menarik dan mendapat perhatian luas. Pencemaran lingkungan terjadi karena kelalaian perusahaan dalam mengelola operasional tanpa memantau dampak lingkungan dari aktivitas yang dilakukan tersebut, (Mulpiani, 2019). Bercermin dari masalah lingkungan tersebut seiring dengan berkembangnya zaman, selain dituntut untuk menghasilkan laba maka perusahaan turut ikut memberikan perhatian berupa tanggung jawab sosial serta lingkungan dengan menjaga keseimbangan *Triple Bottom Line* atau *profit, planet, dan people* (Sujatnika dkk., 2023). Konsep tersebut berhubungan dengan kesejahteraan ekonomi, kualitas lingkungan, dan keadilan sosial. Pemenuhan tanggung jawab merujuk konsep *Triple Bottom Line* tersebut pelaksanaannya melalui pengungkapan kinerja secara berkelanjutan.

Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja keberlanjutan sudah menjadi perhatian dikalangan perusahaan yang mana media untuk mengungkapkan kinerja keberlanjutan dapat dilihat melalui laporan keberlanjutan. Perusahaan tidak hanya mengedepankan laba akan tetapi diharapkan untuk memainkan peran dan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, Novia (dalam Clara & Salim, 2022). Laporan keberlanjutan merupakan tindakan pengungkapan, pengukuran, dan kinerja yang dilakukan untuk merealisasikan pembangunan berkelanjutan baik dari eksternal maupun internal organisasi tersebut (Prabaningrum & Pramita, 2019).

Pengungkapan kinerja keberlanjutan merupakan cara untuk memperoleh pengakuan dari masyarakat dan dapat membentuk citra positif di kalangan *stakeholder*. Berdasarkan pernyataan Manase dkk., (2022) dalam artikelnya mengungkapkan bahwa fungsi dari laporan keberlanjutan bagi perusahaan yaitu sebagai evaluasi terhadap pencapaian target *Triple Bottom Line*, fungsi bagi investor yaitu sebagai alat pengendalian untuk menilai kinerja perusahaan, dan fungsi bagi *stakeholder* yaitu untuk menilai sejauh mana komitmen perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Pengungkapan laporan keberlanjutan ini dibuat sebagai salah satu tanggung jawab perusahaan adalah dengan membuat laporan keberlanjutan. Pemerintah Indonesia turut serta memberi perhatian terhadap laporan keberlanjutan melalui dikeluarkannya peraturan tentang laporan keberlanjutan pada UU No 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas yang memberikan aturan mengenai kewajiban perusahaan dalam pengungkapan tanggung jawab sosial Pasal 74 Ayat 1 yakni:

“Perseroan menjalankan kegiatan usahanya yang berhubungan terhadap sumber daya wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya”

Kewajiban penerapan laporan keberlanjutan juga telah ditetapkan melalui Peraturan OJK. Berdasarkan Peraturan OJK No 51/POJK.03/2017 mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Perusahaan Publik, Emiten, maupun Lembaga Jasa Keuangan Pasal 10 Ayat (1), (2), (3) berbunyi :

1. Pasal 10 Ayat (1) : “LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib menyusun Laporan Keberlanjutan”.
2. Pasal 10 Ayat (2) : “Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terpisah dari laporan tahunan atau sebagai bagian yang tidak terpisah dari laporan tahunan”.
3. Pasal 10 Ayat (3) : “Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap tahun paling lambat sesuai dengan batas waktu penyampaian laporan tahunan yang berlaku untuk masing-masing LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik”.

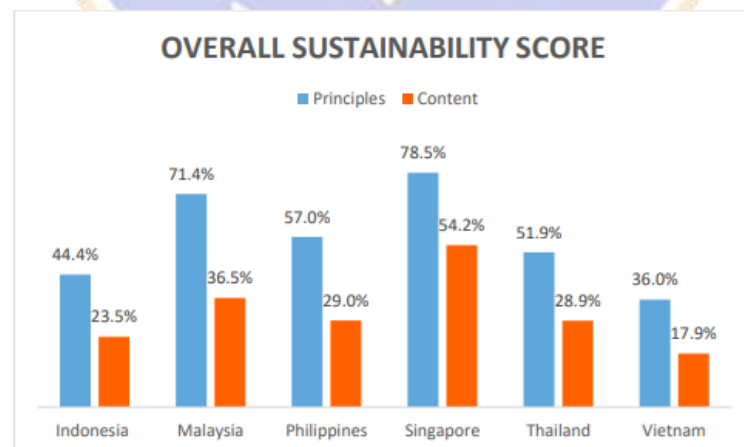
Peningkatan perusahaan yang mengungkapkan kinerja keberlanjutan juga terjadi pada tahun 2018-2022 hal tersebut diperoleh berdasarkan data dari Corporate Register yang merupakan direktori *online global* tentang perusahaan yang melaporkan tanggung jawab perusahaan melalui data laporan keberlanjutan yang tersedia. Adapun data tersebut sebagai berikut.



Gambar 1. 1 Jumlah Partisipasi Laporan Keberlanjutan di Indonesia
(Sumber: Corporate Register, 2023)

Peningkatan pengungkapan laporan keberlanjutan dapat dilihat dalam Laporan Asia Pacific Sustainability Counts II yang dirilis (PWC, 2023). Berdasarkan laporan tersebut disimpulkan bahwa terdapat peningkatan laporan keberlanjutan perusahaan di Indonesia dari 77% pada tahun 2021 menjadi 88% di tahun 2022. Adanya peningkatan pengungkapan laporan keberlanjutan di Indonesia menunjukkan perkembangan positif, namun jika dibandingkan dengan negara lain khususnya di negara ASEAN tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan di Indonesia masih lebih rendah. Berdasarkan data dari Climate Reporting in ASEAN tahun 2022 dalam Loh (2022) menunjukkan bahwa tingkat laporan keberlanjutan di Indonesia sebesar 44%, Malaysia sebesar 48%, Filipina sebesar 42%, Singapore sebesar 48%, Thailand sebesar 57%.

Data mengenai pengungkapan laporan keberlanjutan negara Indonesia juga diungkapkan dalam Sustainable Finance White Papers tahun 2023. Berdasarkan data dari Asean Capital Markets Forum mengenai Sustainable Finance White Papers tahun 2023 mengungkapkan skor laporan keberlanjutan di negara ASEAN, sebagai berikut.



Gambar 1. 2 Skor Laporan Keberlanjutan di Negara ASEAN
(Sumber : Sustainable Finance White Papers (2023))

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwasannya skor laporan keberlanjutan negara Indonesia lebih rendah yaitu sebesar 44,4% dan 23,5% jika dibandingkan dengan negara Malaysia, Filipina, Singapore, dan Thailand. Hasil laporan tersebut juga didukung. Berdasarkan artikel Sujatnika dkk., (2023) menyatakan bahwa rendahnya laporan pengungkapan kinerja keberlanjutan di Indonesia dikarenakan antusiasme perusahaan, pemahaman perusahaan mengenai peran lingkungan serta sosial terkategori rendah. Selain hal tersebut, rendahnya tingkat pengungkapan dikarenakan kurangnya transparansi perusahaan dalam menjalankan bisnisnya dan perusahaan berasumsi bahwa perlu biaya tambahan untuk membuat laporan keberlanjutan.

Pada kajian studi ini, penulis menggunakan perusahaan perbankan disebabkan tingkat pengungkapan perusahaan perbankan lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan lain. Berdasarkan *summary report* Katadata Corporate Sustainability Index (KCSI) tahun 2023 hasil data pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan sektor perbankan sebesar 31,03%, sektor bahan kimia 41,88%, sektor transportasi dan logistik sebesar 43,26%, sektor industri dan makanan sebesar 46,57%, sektor energi 49,13%, sektor pertambangan sebesar 50,22%, dan sektor perkebunan 56,86%. KCSI mengukur dan memetakan perusahaan berdasarkan sektor dan kinerja keberlanjutan perusahaan berdasar aspek ESG (*Environmental, Social, dan Governance*).

Aktivitas operasional di sektor perbankan ketika dilihat dari perspektif luar mungkin terlihat memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah jika dibandingkan sektor lainnya. Tetapi, pada kenyataannya sektor perbankan juga memiliki kontribusi signifikan sebagai penyedia dana untuk kegiatan industrialisasi dan

eksploitasi melalui proses pendanaan yang diberikan kepada perusahaan. Terdapat beberapa perusahaan perbankan yang terlibat dalam proyek pendanaan untuk perusahaan batubara seperti yang dipaparkan dalam artikel (Ronaldo & Handayani, 2023) beberapa bank di Indonesia seperti PT Bank Mandiri Tbk dengan jumlah Rp 36 Triliun, PT BNI Tbk sebesar 27 Triliun, PT BRI Tbk dengan jumlah Rp 26 Triliun, dan PT BCA Tbk dengan jumlah Rp 12 Triliun. Proyek yang didanai perusahaan perbankan tersebut salah satunya adalah PLTU Jawa 9 dan 10 dan ada dugaan 4700 kematian dini karena operasional proyek tersebut. Sehingga diharapkan perusahaan perbankan memperhatikan proyek yang berfokus pada peningkatan kualitas lingkungan hidup mencakup untuk mengungkapkan laporan keberlanjutan.

Berdasarkan teori *stakeholder* yang merupakan teori utama dalam penelitian pengungkapan kinerja keberlanjutan menekankan bahwasanya perusahaan tidak beroperasi demi kepentingannya saja namun memberikan manfaat kepada *stakeholder*, (Karlina dkk., 2019). Teori *stakeholder* menyatakan bahwasannya manajer harus merumuskan dan menerapkan proses dan tidak hanya pada kelompok mereka yang memiliki kepentingan bisnis, (Dewi, 2019). Teori *stakeholder* merupakan teori yang dapat menguraikan keterkaitan perusahaan dengan pihak lainnya. Dengan profitabilitas perusahaan memiliki tanggung jawab ke pemilik saham. Selain itu dengan *leverage* perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap kreditor. Dengan mengungkapkan kinerja keberlanjutan diupayakan apa yang diinginkan *stakeholder* mengenai kinerja keberlanjutan perusahaan bisa diwujudkan (Liana, 2019).

Salah satu upaya untuk menciptakan hubungan harmonis antara perusahaan dan para pihak yang berkepentingan sehingga perusahaan berusaha memenuhi kebutuhan mereka seperti informasi yang dinyatakan dengan mengungkapkan laporan keberlanjutan hal tersebut dinyatakan dalam teori *stakeholder*, (Sujatnika dkk., 2023). Hubungan antara teori *stakeholder* dengan variabel profitabilitas yaitu profitabilitas perusahaan yang menunjukkan keuntungan berkelanjutan cenderung mengalokasikan sumber daya ke dalam pengungkapan laporan keberlanjutan. Hal tersebut juga disampaikan dalam penelitian Sujatnika dkk., (2023) yang menyatakan bahwasanya peningkatan laporan keberlanjutan perusahaan terpengaruh oleh tingginya profitabilitas, sehingga muncul keinginan menunjukkan kepada publik dan *stakeholder*.

Perusahaan memiliki kewajiban untuk memberi kegunaan untuk seluruh pemangku kepentingan hal tersebut diungkapkan dalam teori *stakeholder*. Hubungan antara *leverage* dengan pengungkapan laporan keberlanjutan yaitu *leverage* yang memperlihatkan besarnya jumlah utang selaku sumber pendanaan tambahan dapat mempengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan. Biasanya perusahaan melalui tingkat *leverage* tinggi bisa menyajikan informasi yang lebih banyak kepada *stakeholder*. Sejalan penelitian yang dilakukan Dewi & Budiasih (2021) yang menyampaikan bahwasanya semakin tinggi *leverage* perusahaan artinya semakin efektif penggunaan modal kerja dan cepatnya perputaran modal kerja menjadikan semakin besar keuntungan untuk meningkatkan pengungkapan kinerja keberlanjutan melalui laporan keberlanjutan.

Selain teori utama mengenai teori *stakeholder*, pada riset ini penulis menerapkan teori pendukung yakni teori legitimasi dan teori agensi. Teori

legitimasi dikemukakan pertama kali oleh Dowling & Preffer, beliau menyatakan bahwa legitimasi merupakan kondisi keberpihakan individu atau kelompok yang peka pada lingkungan. Wardoyo dkk., (2022) menyatakan bahwa dalam mempertahankan bunga manajemen perlu melakukan tindakan legitimasi sebagai pengakuan investor, kreditor, publik maupun pemerintah untuk mendapatkan legitimasi, teori legitimasi lebih berfokus terhadap interaksi masyarakat dengan perusahaan dalam hal tersebut dengan pengungkapan laporan keberlanjutan menjadi bukti bahwa organisasi sudah melaksanakan operasional sesuai kepentingan masyarakat dalam hal ini tindakan perusahaan dianggap sah jika perusahaan tersebut diterima secara sosial, (Karlina dkk., 2019).

Teori pendukung selanjutnya adalah teori agensi yang mana teori ini digunakan dalam menanggulangi konflik agensi yang berlangsung pada hubungan agensi. Selain itu juga digunakan dalam pemenuhan kepentingan *stakeholder* pihak manajemen dalam mengungkapkan laporan perusahaan untuk memenuhi tuntutan publik, (Dari dkk., 2022). Dalam hal ini kepemilikan institusional dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah agensi dengan memperkuat proses pemantauan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingginya kepemilikan institusional berdampak pada kontrol investor pada manajemen, Sujatnika dkk., (2023). Selanjutnya mengenai keterkaitan teori agensi dengan ukuran dewan direksi yaitu dalam teori agensi menyampaikan bahwasanya besarnya ukuran dewan direksi mampu meminimalisir adanya konflik agensi yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan peningkatan pengungkapan laporan keberlanjutan, (Purbandari & Suryani, 2021).

Pengungkapan kinerja keberlanjutan dapat diungkap melalui aspek keuangan ataupun non keuangan. Faktor keuangan mampu mempengaruhi meliputi profitabilitas, *firm size*, likuiditas, *leverage*, dan *growth*. Sedangkan faktor non keuangan meliputi kepemilikan asing, kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, komitmen audit, serta dewan komisaris independen (Edinov dkk., 2022). Namun, variabel independen yang diterapkan pada studi ini adalah profitabilitas *leverage*, kepemilikan institusional, maupun ukuran dewan direksi.

Pemilihan profitabilitas sebagai variabel penelitian ini dikarenakan profitabilitas ialah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dimana hal tersebut digunakan menjadi variabel bebas karena hubungan antara tingkat profitabilitas dengan pengungkapan kinerja keberlanjutan belum sepenuhnya terjelaskan dalam penelitian sebelumnya dan didasarkan pada inkonsistensi temuan penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelitian Sujatnika dkk., (2023) dan Krisyadi & Elleen (2020) menyatakan bahwasanya profitabilitas mempengaruhi pengungkapan kinerja keberlanjutan. Tingginya profitabilitas tentunya akan membuat perusahaan mengungkapkan kinerja keberlanjutan melalui media laporan keberlanjutan yang memerlukan biaya yang besar tersebut memperlihatkan bahwasanya pihak pengelola ingin meyakinkan investor mengenai kompetensi maupun profitabilitas manajemen sehingga mereka yakin akan melakukan investasi dana yang dimiliki untuk pemenuhan kebutuhan perusahaan dalam rangka mempertanggungjawabkannya ke *stakeholder*. Hal tersebut membutuhkan pengungkapan kinerja keberlanjutan. Sedangkan penelitian Gunawan & Sjarief (2022) dan Afifah dkk., (2022) menyatakan bahwasanya profitabilitas tidak mempengaruhi pengungkapan kinerja keberlanjutan karena tingginya profitabilitas

yang dimiliki perusahaan belum tentu melakukan pengungkapan kinerja keberlanjutan karena diprioritaskan untuk kepentingan operasional.

Dalam upaya untuk melihat dampak struktur keuangan terhadap pengungkapan kinerja keberlanjutan, variabel *leverage* digunakan dalam penelitian ini dikarenakan adanya kekurangan penelitian yang menyelidiki hubungan ini. Berdasarkan penelitian Gunawan & Sjarief (2022) dan Afifah dkk., (2022) menyatakan bahwasanya *leverage* mempengaruhi pengungkapan kinerja keberlanjutan ini disebabkan oleh tingginya *leverage* menandakan perusahaan kebergantungan pada utang yang menjadikan perusahaan melakukan peningkatan untuk mengungkapkan kinerja keberlanjutan dalam menutupi masalah kekurangan dan agar menjadi nilai tambah di mata *stakeholder*. Namun jika dilihat berdasarkan penelitian Hermawan & Sutarti (2021) dan Tobing dkk., (2019) menyatakan bahwasanya *leverage* tidak mempengaruhi pengungkapan laporan berkelanjutan karena tingginya *leverage* bisa melanggar perjanjian kredit dimana perusahaan berusaha menyampaikan laporan mengenai laba yang tinggi dengan mengurangi beberapa biaya salah satunya untuk biaya pengungkapan laporan keberlanjutan.

Pemilihan kepemilikan institusional dalam penelitian ini dilandaskan pada *research gap* terkait dengan keterbatasan pemahaman mengenai bagaimana kepemilikan institusional mempengaruhi pengungkapan kinerja keberlanjutan. Berdasarkan riset milik Noerkholiq & Muslih (2021) dan Dari dkk., (2022) menyatakan bahwasanya kepemilikan institusional mempengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan hal tersebut dikarenakan tingginya kepemilikan institusional maka pengungkapan laporan keberlanjutan akan semakin tinggi pula. Hal ini artinya kepemilikan institusional sudah mempertimbangkan laporan keberlanjutan

sebagai pertimbangan investasi dimana investor mendorong perusahaan untuk mengungkapkannya, tinggi rendahnya kepemilikan institusional akan tetap terkontrol dalam pengambilan keputusan strategis tentang inovasi dalam pembangunan keberlanjutan perusahaan. Namun hasil penelitian Madani & Gayatri (2021) dan Sujatnika dkk., (2023) mengemukakan bahwasanya kepemilikan institusional tidak memberikan pengaruh karena biasanya investor institusi hanya berfokus terhadap pencapaian jangka pendek serta memiliki kesadaran yang rendah akan keberlangsungan masa depan dan tidak memerhatikan pengungkapan laporan keberlanjutan.

Ukuran dewan direksi dipilih sebagai variabel bebas untuk mengeksplorasi peran pengambilan keputusan dalam aktivitas keberlanjutan dan didasarkan pada inkonsistensi temuan penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian Krisyadi & Elleen (2020) dan Sinaga & Fachrurrozie (2017) mengemukakan bahwasanya ukuran dewan direksi mempengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan hal ini disebabkan banyaknya anggota dewan direksi yang diyakini perusahaan akan membantu manajemen untuk pengambilan keputusan sehingga akan memberikan pengaruh pada pengungkapan laporan keberlanjutan. Berlandaskan riset yang dilakukan Nofita & Sebrina (2023) dan Purbandari & Suryani (2021) mengemukakan bahwasanya ukuran dewan direksi tidak mempengaruhi pengungkapan kinerja keberlanjutan yang diungkapkan melalui laporan keberlanjutan

Profitabilitas didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk menciptakan laba berhubungan dengan aset maupun tingkat penjualan pada modal saham khusus, (Dewi, 2019). Maka tingginya tingkat profitabilitas perusahaan

akan berbanding lurus dengan banyaknya pengungkapan laporan keberlanjutan yang dilaksanakan oleh perusahaan dan tentunya akan menarik minat investor ataupun stakeholder dalam penanaman modal, begitu juga apabila profitabilitas menurun maka hal tersebut bisa berpotensi investor menarik kembali dana yang telah diinvestasikan (Anggreni, 2020). *Leverage* didefinisikan sebagai rasio dipakai dalam melakukan pengukuran sejauh mana perusahaan mampu membiayai hutang yang mana apabila *leverage* tinggi maka pemakaian hutang perusahaan akan makin meningkat pula jika dibandingkan dengan modal sendiri, (Marbun, 2022). Penggunaan variabel *leverage* dalam pengungkapan laporan keberlanjutan karena bisa menyajikan informasi ke *stakeholder* tentang bagaimana struktur modal perusahaan dan tingkat ketergantungan pada pinjaman.

Saham yang dimiliki oleh institusi pengelola dana orang lain atau lembaga keuangan non-bank disebut sebagai kepemilikan institusional. Kepemilikan saham yang tinggi atau besar dapat mendorong pengungkapan laporan keberlanjutan yang tinggi, besarnya kepemilikan institusional pada suatu perusahaan tentunya dapat meningkatkan pengendalian. Terakhir, Dewan Direksi merupakan organ perusahaan yang bertanggungjawab terhadap kepentingan perusahaan, memimpin dan melaksanakan aktivitas operasional, (Merna, 2021). Dalam hal kapasitas dewan biasanya perusahaan yang memiliki dewan direksi lebih besar dan rapat dewan lebih tinggi biasanya pengungkapan laporan keberlanjutan dan kualitas pelaporannya lebih tinggi, (Purbandari & Suryani, 2021).

Berdasarkan penelitian Sujatnika dkk., (2023), Krisyadi & Elleen (2020), Hermawan & Sutarti (2021), Putri & Pramudiati (2019), Meutia & Titik (2019) menyatakan bahwasanya profitabilitas mempengaruhi pengungkapan laporan

keberlanjutan. Dalam riset milik Gunawan & Sjarief (2022), Afifah dkk., (2022), Putri & Pramudiati (2019), Liana (2019) mengemukakan bahwasanya *leverage* mempengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan. Dalam riset milik Noerkholiq & Muslih (2021), Kurniawan & Astuti (2021), dan Dari dkk., (2022) mengemukakan bahwasanya kepemilikan institusional mempengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan. Dalam riset milik Krisyadi & Elleen (2020), Sinaga & Fachrurrozie (2017), Ludianah dkk.,(2022), Sofa & Respati (2020) mengemukakan bahwasanya ukuran dewan direksi memberikan pengaruh pada pengungkapan laporan berkelanjutan.

Terdapat beberapa hasil riset yang menyatakan bahwasanya profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional, dan ukuran dewan direksi tidak berdampak bagi pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan. Penelitian dari Gunawan & Sjarief (2022), Afifah dkk., (2022), Madani & Gayatri (2021), Noerkholiq & Muslih, (2021), Pulungan dkk., (2022) menyatakan bahwasanya profitabilitas tidak mempengaruhi pengungkapan laporan berkelanjutan. Namun dalam penelitian Hermawan & Sutarti (2021), Tobing dkk., (2019), Meutia & Titik (2019), Pulungan dkk., (2022), Prabaningrum & Pramita (2019) menyatakan bahwa *Leverage* tidak memberikan pengaruh dalam mengungkapkan laporan keberlanjutan. Namun riset yang dilakukan Madani & Gayatri (2021), Sujatnika dkk.,(2023), Wahyudi (2023), dan Ludianah dkk., (2022) menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional tidak mempengaruhi pada pengungkapan laporan keberlanjutan. Namun berdasarkan penelitian Nofita & Sebrina (2023), Purbandari & Suryani (2021), Prabaningrum & Pramita (2019) mengemukakan bahwasanya dewan direksi tidak mempengaruhi pengungkapan laporan berkelanjutan.

Penelitian di bidang ini masih menjadi masalah yang menarik. Kurangnya konsistensi dalam temuan penelitian sebelumnya telah menciptakan kesenjangan penelitian, mendorong akademisi untuk melakukan penyelidikan baru mengenai topik pengungkapan kinerja keberlanjutan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan dampak variabel-variabel ini terhadap teori yang mendasarinya. Peneliti ingin menguji kembali mengenai variabel profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional dalam pengungkapan kinerja keberlanjutan.

Pada kajian studi inipun akan dilaksanakan penambahan variabel ukuran dewan direksi. Dimana Ukuran Dewan Direksi menjadi bagian paling krusial di pihak manajemen yang bertanggung jawab pada pemangku kepentingan dan bertanggungjawab terhadap kepentingan perusahaan, memimpin dan melaksanakan aktivitas operasional. Kemudian, data yang dianalisis pada riset ini didapatkan dari laporan perusahaan yang beroperasi pada bidang perbankan dan sudah terdaftar pada BEI dalam kurun waktu 2018-2022. Sehingga, melalui penjelasan tersebut, riset ini berjudul: **"Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Dewan Direksi terhadap Pengungkapan Kinerja Keberlanjutan pada Perusahaan Perbankan BEI Tahun 2018-2022"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Merujuk pemaparan, berikut permasalahan :

1. Perkembangan pengungkapan kinerja keberlanjutan yang diungkap melalui laporan keberlanjutan pada perusahaan di Indonesia mengalami peningkatan. Tetapi jika dibandingkan dengan negara lain khususnya di negara ASEAN tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan di Indonesia masih lebih rendah.

2. Berdasarkan data mengenai pengungkapan kinerja keberlanjutan melalui laporan keberlanjutan menyatakan bahwa perusahaan perbankan memiliki tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan lebih rendah jika dibandingkan dengan perusahaan lain.
3. Aktivitas operasional di sektor perbankan ketika dilihat dari perspektif luar terlihat memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah jika dibandingkan sektor lainnya. Tetapi, pada kenyataannya sektor perbankan khususnya juga memiliki kontribusi signifikan sebagai penyedia dana untuk kegiatan industrialisasi dan eksploitasi melalui proses pendanaan yang diberikan kepada perusahaan.

1.3 Pembatasan Masalah

Melalui identifikasi permasalahan tersebut, untuk memperoleh hasil yang terfokus dan terhindar dari kesalahpahaman, penelitian dibatasi hanya mengungkap pengaruh profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional, dan ukuran dewan direksi pada pengungkapan kinerja keberlanjutan pada perusahaan perbankan di BEI dengan menggunakan tahun 2018-2022.

1.4 Rumusan Masalah

Merujuk pemaparan, berikut rumusan masalah penelitian:

1. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan kinerja keberlanjutan pada perusahaan perbankan BEI tahun 2018-2022?
2. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan kinerja keberlanjutan pada perusahaan perbankan BEI tahun 2018-2022?
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan

kinerja keberlanjutan pada perusahaan perbankan BEI tahun 2018-2022?

4. Bagaimana pengaruh ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan kinerja keberlanjutan pada perusahaan perbankan BEI tahun 2018-2022?

1.5 Tujuan Penelitian

Merujuk pemaparan, berikut tujuan pelaksanaan riset :

1. Guna mengidentifikasi pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan kinerja keberlanjutan pada perusahaan perbankan BEI tahun 2018-2022.
2. Guna mengidentifikasi pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan kinerja keberlanjutan pada perusahaan perbankan BEI tahun 2018-2022.
3. Guna mengidentifikasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan kinerja keberlanjutan pada perusahaan perbankan BEI tahun 2018-2022.
4. Guna mengidentifikasi pengaruh ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan kinerja keberlanjutan pada perusahaan perbankan BEI tahun 2018-2022.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat riset ini peneliti harap bisa memberi kegunaan baik ditinjau secara praktis dan dengan teoritis.

1. Manfaat Teoritis

Bisa menyumbangkan kegunaan untuk kemajuan ilmu pengetahuan utamanya terkait informasi terkait pengaruh profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional, dan ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan kinerja keberlanjutan.

2. Manfaat Praktis.

- 1) Untuk Perusahaan : riset ini peneliti harap bisa menyajikan informasi untuk pihak perusahaan. Diharapkan kajian studi ini bisa digunakan selaku referensi oleh perusahaan sehingga bisa memberikan informasi untuk pertimbangan mengenai pengungkapan kinerja keberlanjutan untuk meningkatkan reputasi perusahaan dan menjadi perwujudan transparansi maupun akuntabilitas perusahaan pada *stakeholder*.
- 2) Bagi Peneliti Selanjutnya : Data dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti yang tertarik dengan topik tersebut. Diharapkan mereka dapat mengembangkan penelitian ini dan lebih menyempurnakannya untuk mencapai hasil yang optimal.
- 3) Bagi Investor : Dengan riset ini bisa digunakan sebagai tolak ukur seorang investor guna memperoleh dan membuat keputusan investasi yang lebih informatif dan dapat membuat analisis investor lebih cermat mengenai keberlanjutan perusahaan perbankan yang mereka pertimbangkan.

